

**MODEL IMPLEMENTASI DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT**

**DI DESA WISATA MUNGGU KABUPATEN BADUNG BALI**

**I Wayan Kartimin1, Ni Wayan Mekarini2**

*1,2 Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulya Bali*, *Email: wayan.mekarini@triatmamulya.ac.id*

***ABSTRAK***

Penelitian ini mengungkap model implementasi desa wisata berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Desa Wisata Munggu Kabupaten Badung Bali terkait pengelolaan potensi lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Data dijaring melalui pengamatan dan wawancara mendalam dengan tokoh desa termasuk Kepala Desa dan Ketua Pokdarwis. Meskipun status desa wisata telah diperoleh sejak tahun 2010 bersama dengan 10 desa lainnya di Kabupaten Badung, tetapi belum tampak gerak perubahan yang berarti hingga ketua Pokdarwis melakukan audiensi ke kantor Dinas Pariwisata untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Berpegang pada arahan tersebut, berbagai rancangan disusun dan diterapkan seperti pembentukan Kelompok Sadar Wisata yang diperkuat dengan SK Kepala Desa, sosialisasi masyarakat tentang desa wisata dan peluang kerja. Untuk pengawasan keuangan, Pokdarwis berkerjasama dengan BumDes sehingga pembagian keuntungan dapat dinikmati semua warga Desa Munggu. Langkah awalnya dipusatkan di pantai Munggu berupa menjaga kebersihan, menyediakan tempat berjualan, penataan lahan parkir, sarana MCK dan pusat informasi. Terkait kebiasaan baru, Pokdarwis telah menerapkan CHSE di pantai Munggu seperti penyediaan tempat cuci tangan, sabun sanitizer hingga pembatasan jumlah pengunjung. Sumber penerimaan terbesar adalah retribusi pedagang dan penjualan tiket parkir yang setelah dikurangi biaya operasional diserahkan 45% untuk BumDes. Selanjutnya, keuntungan itu dibagi kepada masyarakat secara merata melalui Kelompok Banjar setelah 5% dialokasikan untuk donasi dan pogram pendidikan. Dengan demikian, Desa Wisata Munggu berhasil menerapkan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat yang tidak menyimpang dengan model pengelolaan desa-desa wisata di Bali.

**Kata Kunci:** Desa Wisata Munggu; Pokdarwis; BumDes; Desa Wisata Berbasis Masyarakat

***COMMUNITY-BASED TOURISM MODEL HELD BY MUNGGU***

***TOURISM VILLAGE BADUNG REGENCY BALI***

***ABSTRACT***

*The research entitled The Implementation of Community Based Tourism Model in Munggu Village Badung Bali focused on how Munggu tourist village manage the local tourist potencies based on community participation. Data collected by observation and deep interview with village leaders and Pokdarwis (local tourism management) Head. Though the status as tourist village for Munggu village is given in 2010 with 10 other villages in Badung Regency but the follow up run slowly until the new Pokdarwis Leader make a visit to Tourist Board of Badung Regency who give a slight understanding. Then, the community-based management is implemented start from village legality, local people representative, socialization program to stakeholders, people chance for getting job, collaboration with BumDes (Commercial Village Board) as well as receiving profit through legal institution. In the program of managing Munggu Beach, Pokdarwis team held some preparations, such as cleanliness, placing food stall, parking area, toilet, information desk with healthy protocol aids. The source of fund come from food stall retribution and parking ticket. Later, it is divided 45% for BumDes after taking some for operational and depreciation. It means that the profit is shared to people through relevant institution where as another 5% for donation and education program. In short, Munggu Tourist Village successfully implemented community-based tourism management which is similar to village management model in Bali.*

***Keywords : Munggu Village, Pokdarwis, BumDes, Community-Based Tourism model***

***Copyright ©2023. UHN IGB Sugriwa Denpasar. All Right Reserved***

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Badung cenderung menonjolkan keindahan alam dan keelokan sosial budaya masyarakat lokal yang khas pada desa-desa wisatanya. Sesungguhnya daya tarik serupa itu bersifat alamiah tanpa sentuhan yang signifikan dari pihak pengelola. Bila pengelola dalam waktu lama tidak melakukan pembangunan dan penataan yang berarti maka desa wisata tampak serupa dan mirip dengan desa-desa wisata lainnya yang menghandalkan pesona alam warisan dari bumi pertiwi tempat tinggalnya. Dan jika inovasi untuk mengkolaborasi antara potensi alam, budaya dengan kreatifitas masyarakat setempat tidak dimunculkan maka kesan monoton atas model pengelolaan antara daya tarik desa wisata yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dielakkan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu terobosan inovasi demi pengembangan desa wisata sebagai deversifikasi produk pariwisata untuk namun mampu bahkan menarik penungjung lebih banyak lagi dan menghindari timbulnya kejenuhan.

Desa Wisata Munggu yang terletak di di wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung merupakan salah satu desa wisata yang ditetapkan pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2010. Dalam Perbup tersebut ditetapkan 11 (sebelas) kawasan desa wisata di wilayah Kabupaten Badung, masing-masing 4 desa di Kecamatan Mengwi, 2 desa di Kecamatan Abiansemal dan 5 desa di kecamatan Petang. Desa-desa yang dimaksud adalah Desa Bongkasa Pertiwi Banjar Karang Dalem di Kecamatan Abiansemal; Desa Pangsan Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang; Desa Kerta Kecamatan Petang; Desa Plaga Banjar Kiadan, Kecamatan Petang; Desa Belok Banjar Lawak, Kecamatan Petang; Desa Carang Sari Kecamatan Petang; Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal; Desa Baha Kecamatan Mengwi; Desa Kapal Kecamatan Mengwi; Desa Mengwi dan Desa Munggu Kecamatan Mengwi. Satu dekade kemudian, Perbup tersebut diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2021 yang menetapkan 17 desa wisata di wilayah Kabupaten Badung. Artinya, ada tambahan 6 desa yang memperoleh status desa wisata selain 11 desa wisata yang sebelumnya telah ditetapkan. Tambahan desa yang dimaksud adalah Desa Bongkasa, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Desa Sobangan, Desa Cemagi, Desa Penarungan dan Desa Mengwi. Dengan demikian, komposisi desa wisata di wilayah Badung tersebar di tiga kecamatan dari enam kecamatan di wilayah Kabupaten Badung. Terdapat 8 desa wisata di Kecamatan Mengwi, 4 desa wisata di Kecamatan Abiansemal, dan 5 desa wisata di Kecamatan Petang. Artinya, ada 3 kecamatan di Kabupaten Badung yang tidak memiliki desa wisata, yakni Kecamatan Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan.

Jika Perbup Badung No. 47 Tahun 2010 dicermati maka dapat diketahui arah pengembangan Desa Wisata harus bersesuaian dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung. Pengembangan meliputi tiga aspek utama, yakni (a) mengembangkan pariwisata sektor minat khusus yang mempunyai apresiasi terhadap seni dan budayadan menjadikan aktifitas sehari-hari masyarakat desa sebagai daya tarik wisata, (b) Aktifitas kepariwisataan yang diprioritaskan meliputi agro wisata, wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata Tirta, wisata spiritual, atraksi wisata dan wisata sejarah, (c) Pemanfaatan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan penunjang fasilitas akomodasi di kawasan desa wisata. Dengan demikian, pemerintah daerah Badung mengharapkan pengembangan pariwisata harus memunculkan inovasi yang mengakomodir potensi alam, budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal. Model pengembangan itu lebih dikenal dengan model pengembangan berbasis masyarakat atau Community Based Tourism model (CBT) dimana keterlibatan masyarakat mulai dari tahap penginisiatif, pelaksana hingga di titik akhir penikmat dampak ekonomi pengembangan desa wisata dibagi bersama seluruh lapisan masyarakat.

Desa Munggu tercatat telah melaksanakan pengembangan desa berbasis masyarakat, karena didukung oleh (a) keragaram daya tarik wisata, meliputi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan, (b) menempati lokasi sangat strategis karena sejalur dengan daya tarik wisata yang sudah dikenal umum seperti Pura Taman Ayun, Pantai Canggu, Pantai Berawa dan Echo Beach, (c) memiliki daya tarik berupa tradisi local genius yang bersifat religius yakni tradisi mekotek yang dilaksanakan bertepatan dengan hari raya Kuningan dan sampai sekarang masih dilestarikan. Dengan potensi yang besar tersebut perlu ditelusuri bagaimana strategi pengembangan Desa Wisata Munggu sebagai desa yang menerapkan CBT model ditengah lemahnya SDM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan keterbatasan pemahaman akan konsep desa wisata.

Penelitian ini memiliki urgensi yang layak untuk dilaksanakan mengingat Desa Munggu telah menyandang status desa wisata sejak 2010. Kelayakan itu menurut Ketua Pokdarwis Desa Wisata Munggu karena ditunjang 6 potensi besar namun sejauh ini masyarakat luar lebih mengenal Desa Wisata Munggu melalui tradisi Mekotek, padahal budaya mekotek merupakan salah satu bagai tradisi warisan lintas generasi. Potensi lain mencakup pantai, persawahan, ayunan tradisional, mata air, dan sungai besar yang berpotensi sebagai arena wisata air. Pengelola berharap desa wisata Munggu dapat dijadikan desa wisata rujukan untuk model pengembangan berbasis masyarakat karena telah mencatatkan capaian yakni Desa Wisata Munggu telah menerima piagam penghargaan sebagai peserta Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021 bersama delapan desa wisata dan 2 daya tarik wisata di Kabupaten Badung (badungkab.go.id). Penghargaan ADWI membuat pengelola percaya diri untuk dijadikan model pengembangan desa wisata rujukan bagi desa wisata lain meskipun terkendala dengan pemahaman konsep desa wisata yang utuh. Dengan latar pencapaian tersebut, Ketua Pokdarwis meyakini bahwa pengelolaan telah sesuai dengan konsep CBT dan hal itu perlu penelusuran lebih lanjut. Dengan demikian, rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mencakup (a) model implementasi pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat di desa wisata Munggu serta (b) pemenuhan indikator pengelolaan desa wisata di Bali berbasis masyarakat.

Mahagangga, dkk (2015) melaksanakan kajian terhadap desa-desa wisata di Kabupaten Badung terkait aktivitas desa wisata melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil kajian menunjukkan hanya Desa Wisata Belok Dusun Lawak Kecamatan Petang dan Desa Wisata Plaga Dusun Kiadan, Kecamatan Plaga yang benar-benar menjalankan aktivitas layaknya desa wisata. Desa wisata lainnya masih menghadapi berbagai permasalahan dimana pengelola desa wisata yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berkendala terkait lemahnya pemahaman tentang desa wisata, dukungan pemerintah kabupaten yang belum terintegrasi bersama *stakeholders* pariwisata, pendanaan, potensi yang belum dikembangkan secara maksimal, dan pengembangan daya tarik wisata tanpa perencanaan yang baik. Temuan penting lainnya adalah kerancuan desa wisata dan daya tarik wisata, sehingga di tingkat aplikasi desa-desa wisata yang sudah memiliki daya tarik wisata sudah mapan, akan lebih terangkat namanya, namun secara realitas aktifitas wisata yang dilakukan justru berfokus kepada daya tarik wisata yang ada di desa tersebut. Hal itu berdampak pada produk-produk wisata jarang disentuh Pokdarwis apalagi ditawarkan, sehingga masih banyak desa wisata yang belum memiliki produk-produk wisata maupun atraksi wisata.

Pada dasarnya, pengembangan sektor kepariwisataan ditujukan untuk menekan jumlah kantong- kantong kemiskinan terutama di daerah yang potensial bagi pengembangan kawasan wisata. Pada setiap upaya penegembangan wisata ditargetkan agar masyarakat ikut merasakan manfaat pariwisata dalam kehidupan kesehariannya dan tumbuh kesadaran maka barulah pariwisata dapat menjadi milik bersama, bukan monopoli segelintir orang. Putra (2008), menegaskan bahwa desa wisata seharusnya memenuhi dua komponen yang mendasar dasar yaitu akomodasi dan atraksi. Definisi akomodasi adalah sebagian rumah tempat tinggal penduduk yang disewakan kepada wisatawan, sedangkan aspek atraksi merupakan kehidupan sehari-hari para penduduk desa termasuk pola tata ruang desa yang khas. Dengan demikian, konsep desa wisata adalah suatu bentuk integrasi tiga aspek yakni atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku di daerah setempat (Nuryanti, 1993). Di sisi lain, Inskeep (1995) menerangkan bahwa desa wisata merupakan jenis pariwisata yang melibatkan sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau berdekatan dengan suasana tradisional, di desa-desa terpencil dan belajar tentang tatanan kehidupan masyarakat pedesaan dan lingkungan setempat.

Munculnya desa wisata tidak dapat dilepaskan dari trend wisatawan dengan minat khusus yang beralih orientasi dari keindahan alam menuju interaksi terhadap budaya, masyarakat, maupun alam setempat. Pemenuhan minat khusus ini direalisasikan dengan menonjolkan keunikan suatu kawasan yang tidak lazim dan kaya akan perbedaan yang menonjol dari keseharian para wisatawan tersebut, baik dari rutinitas sehari – hari, pola kebiasaan, ritual, serta pola hidup yang harmonis dengan lingkungan alam. Kemampuan masyarakat untuk tetap memelihara nilai-nilai tradisional di lingkungannya merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung dan bahkan tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama di desa tersebut. Berjalannya wisatawan minat khusus ini diyakini membentuk sistem take and give dari aspek budaya dan aspek ekonomi (Putra, 2008). Oleh sebab itu, pengembangan konsep minat khusus lebih direkomendasikan bagi desa yang memelihara nilai tradisional.

Lahirnya konsep desa wisata merupakan bentuk pengejewantahan atas pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang merupakan reaksi keras terhadap kebijakan pembangunan konglomerasi yakni pembangunan dikuasai para pemodal besar sementara masyarakat umum tidak mampu terlibat dalam pola pembangunan berinvestasi tinggi. Terlebih lagi pemilikan dana tersebut bukanlah warga setempat melainkan pihak penanam modal yang kelak menangguk keuntungan dari daerah tersebut. Konsep kongmolerasi secara berangsur-angsur hendak diimbangi dengan pembangunan berbasis masyarakat lebih mengedepankan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Para pemikir dan praktisi pembangunan pedesaan telah menyadari bahwa pembangunan berbasis konglomerasi lebih banyak merugikan masyarakat setempat karena warga lokal ditinggalkan dalam pembangunan desanya. Masyarakat sebagai pemilik sah atas sumber daya yang ada di lingkungannya termarginalisasi sehingga kualitas hidupnya dapat semakin menurun dibandingkan sebelum adanya pembangunan (Westand Brechin, 1991; Wells dan Brandon, 1992). Pengembangan industri pariwisata khususnya industri bersekala besar dan tentunya padat modal biasanya kurang melibatkan partisipasi anggota masyarakat setempat. Hasilnya, pembangunan pola padat modal ini mendorong terjadinya proses marginalisasi terhadap hak-hak komunitas lokal sebagai pemilik budaya. Terkait hal itu Cernea (1991) menegaskan sikap masyarakat lapisan bawah baik yang berarad di negara-negara maju maupun negara berkembang cenderung tidak berdaya untuk mempengaruhi pola pembangunan pariwisata di daerahnya. Sebagai alternatif atas ketidakberdayaan tersebut, dianjurkan pola pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*Community-Based Tourism* (CBT)) yang memiliki ciri pembangunan pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pendekatan berbasis masyarakat ini dipandang sebagai model pemberdayaan warga setempat dengan memberikan lebih banyak peluang kepada masyarakat lokal untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kepariwisataan. Hal ini berarti memberi kewenangan sekaligus tanggung jawab kepada masyarakat lokal untuk memobilisasi kemampuannya dan dipandang bagian dari potensi sumber daya. Kedudukan masyarakat diharapkan mengambil peran utama manakala membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap kebijakan yang menyangkut kehidupannya (Cernea, 1991). Jika model ini diterapkan niscaya terjadi keterlibatan masyarakat menjadi lebih aktif demi peningkatan environment awareness dan dan proses pengembangan dirinya. Jika dibandingkan dengan pendekatan pewaris (beneficiary approach) dimana masyarakat hanya menerima keuntungan tetapi tidak diberi wewenang, pendekatan CBT lebih nyata dalam tindakan aktif. Pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) menurut Darma Putra (2015) adalah pengembangan pariwisata yang memberi peluang terbuka bagi partisipasi dan keterlibatan komunitas setempat mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan potensi wisata di wilayahnya. Dengan partisipasi aktif itu, komunitas lokal memiliki ruang untuk melakukan kontrol dalam pembangunan dan pengelolaan desa wisata yang pada akhirnya mendapat manfaat ekonomi. Darma Putra juga mengungkap karakteristik model CBT yang lazim diterapkan di desa-desa wisata di Bali, diantarnya (a) adanya inisiatif pengelolaan CBT datang dari lapisan bawah dan dilakukan secara kelembagaan di bawah payung desa adat, desa dinas atau desa pakraman, (b) potensi wisata yang ada di wilayah desa dan menjadi destinasi wisata dimiliki oleh desa dan dikelola secara melembaga baik melalui yayasan atau badan pengelola, (c) hasil keuntungan finansial yang diperoleh sebagian digunakan untuk pembangunan desa dan pembiayaan kegiatan adat keagamaan serta disalurkan kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga yang relevan, (d) setiap peluang kerja dan usaha yang terbuka atas atraksi wisata maka peluang tersebut diperuntukkan kepada masyarakat lokal, dan (e) bonus atas penerapan CBT model Bali adalah dapat berfungsi sebagai penguat social cohesion atau keakraban sosial.

Konsep dasar pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata merujuk pada sikap dan perilaku masyarakat setempat untuk hadir secara aktif dalam pembangunan pariwisata desa. Komunitas diberi hak memberi warna dan pengaruh besar secara sosial maupun secara organisasi kemasyarakatan mengingat hal itu tentu mempengaruhi lingkungan hidupnya. Dalam konteks ini yang dimaksud lingkungan hidup adalah gabungan atas penggunaan sumber daya dan social capital yang ada melalui deretan aktivitas yang dilakukan masyarakat terhadap penggunaan sumber daya. Pelibatan sumber daya tidak bersifat insidental melainkan sebagai sumber daya berkelanjutan. Artinya pembelajaran saat ini akan memberi dampak kemajuan di masa mendatang. Menyadari nilai keberlanjutan itu maka masyarakat diberi culup waktu berproses dalam pengelolaan demi kesejahteraan bersama di masa mendatang. Singkatnya, keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh partisipasi dalam pembangunan pariwisata desa baik keterlibatan berupa keikutsertaan sebagai stake-holders kunci di dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan maupun partisipasi lain yakni ikut aktif memberikan informasi atau konsultasi. Jadi, CBT membuka ruang dan akses bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengambilan keputusan bahkan ambil bagian dalam manajemen pemberdayaan masyarakat.

**METODE**

Penelitian dilaksanakan di Desa Wisata Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung terhitung Oktober 2021-Maret 2022 dengan teknik observasi dan mewawancarai para stakeholder seperti kepala desa, ketua Pokdarwis dan tokoh-tokoh masyarakat yang berkecimpung di bidang pengembangan desa wisata. Hasil wawancara dengan informan dikelola terlebih dahulu dengan menjaring data dan memilah sesuai permasalahan, sementara data yang tidak diperlukan dilakukan reduksi. Selanjutnya, pengorganisasian data yang dilakukan mencakup proses kategorisasi atau pengkodean (*coding*), interpretasi data, pengungkapan relasi antar kelompok kategori. Kemudian dilakukan analisis terhadap relasi-relasi yang terbangun guna memperoleh teori induktif dari topik penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan. Setelah analisis menampakkan gambaran yang jelas maka hasil analisis siap disajikan. Hasil analisis disajikan secara formal dan informal dimana paparan disajikan dalam deskrips berupa kata-kata dan jika dibutuhkan ditampilkan tabel, bagan atau gambar yang menunjang narasi sebelumnya. Kombinasi penyajian diperuntukkan agar hasil penelitian menjadi ringkas, padat dan mudah dipahami para pembaca dan bila memungkinkan membantu peneliti selanjutnya.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Wisata Munggu merupakan salah satu desa di Kabupaten Badung yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Tabanan. Sebagai desa wisata, Munggu senantiasa mendasarkan setiap kebijakan dan bertindak atas dasar Visi Misi yang telah ditetapkan desa. Visi Desa Munggu adalah Shanti Kertha dan Jagatdhita berlandaskan Tri Hita Karana. Visi memuat 3 kata kunci yakni Shanti ‘Damai’, Kertha ‘Adil’, dan Jagatdhita ‘Sejahtera’. Artinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemuka desa mesti diarahkan pada tujuan memperoleh kedamaian, keadilan dan menuju kesejahteraan bersama. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 Misi yakni (a) Mendorong pembangunan yang bersifat partisipatif; (b) Meningkatkan Kualitas SDM masyarakat dan pemuka desa untuk meningkatkan kinerja dan daya saing; (c) Mendorong pembangunan Infrastruktur dan sarana kemajuan Desa; (d) Mendorong program kesehatan masyarakat pemuda dan olahraga; (e ) Mendorong pelestarian seni budaya dan keasrian lingkungan ; (f) Meningkatkan keamanan dan ketertiban desa; (g) Mendorong pembangunan ekonomi kreatif serta pengentasan kemiskinan dan mendukung program disabilitas; (h) Melanjutkan kegiatan kemasyarakatan demi terus menggalang solidaritas dan kebersamaan sebagai warga yang cinta desanya dan (i) Melaksanakan dan mendukung program dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Ditinjau dari luas wilayah, Desa Wisata Munggu merupakan daerah yang memiliki luas wilayah menurut penggunaan yaitu sebesar 715,00 Ha, yang Sebagian berupa persawahan lahan basah. Adapun bentangan wilayah Desa Munggu membentang utara-selatan dengan batas wilayah sebagai berikut.

 **Tabel 1**. Batas Desa Munggu

|  |  |
| --- | --- |
| **Arah** | **Nama Desa** |
| **Kecamatan** | **Kabupaten**  |
| UtaraTimur | Desa CepakaKecamatan Kediri Desa Tumbak BayuhDesa Pererenan | Tabanan Badung |
| SelatanBarat | Samudra Indonesia Desa CemagiDesa Buwit  | BadungTabanan |

Topografi Desa Munggu, 2022

Secara umum, masyarakat Bali mengenal Desa Munggu karena adanya tradisi *Mekotek* yang dilaksanakan setiap 210 hari yakni pada Hari raya Kuningan. Kiranya pelestarian tradisi *Mekotek* atau dikenal pula dengan istilah *Ngerebeg* inilah yang menyebabkan penetapan Desa Munggu sebagai desa wisata dengan terbitnya Peraturan Bupati Badung No. 47 pada tahun 2010. Dalam Peraturan Bupati (Perbup) tersebut tercatat Desa Munggu adalah satu dari desa wisata di Kabupaten Badung bersama 10 desa wisata lainnya. Sayangnya, Perbup tersebut tidak diikuti petunjuk pelaksanaan di lapangan semacam petunjuk teknis sehingga tindak lanjut atas perolehan status desa wisata masih misteri. Setelah menunggu 2 tahun, akhirnya audiensi dilakukan ke Dinas Pariwisata untuk mendapat arahan semestinya, hingga terbitlah Keputusan Perbekel Desa Munggu No. 382 tahun 2012 tentang Pokdarwis sebagai penggerak desa wisata.

1. **Model Pengelolaan Desa Wisata Munggu**

Pengelolaan suatu desa wisata bisa jadi unik dan berbeda dengan desa lainnya terdampak lingkungan dan masyarakat setempat. Pengelolan Desa Munggu dimulai sejak awal pembentukan Pokdarwis yang melewati banyak hambatan. Pada akhirnya, berhasil terbentuk manajemen pengelolaan desa wisata dan masyarakat mendapat keuntungan atas atraksi wisata desa tersebut.

1. **Keterlibatan masyarakat pada pembentukan Pokdarwis**

Dengan perolehan legalitas bahwa Pokdarwis sebagai penggerak desa wisata, maka pemilihan Ketua Formasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) mulai dilaksanakan. Dengan berbagai pertimbangan dalam pemilihan sosok yang ditugasi mengemban tugas berat itu, maka akhirnya, diangkatlah salah satu warga Munggu yang dipandang memenuhi kriteria mampu menggerakkan masyarakat yakni Bapak Nyoman Nikanaya. Pengangkatan beliau sebagai Ketua melalui SK Perbekel Munggu tahun 2014. Penugasan itu dilatari atas banyaknya pengalaman berorganisasi baik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Bali maupun Ketua Art Centre Denpasar. Akan tetapi keterbatasan waktu dan gangguan kesehatan mata menyebabkan perjalanan Pokdarwis berjalan di tempat dimana pendataan objek potensial belum sepenuhnya terlaksana. Akhirnya tugas Ketua Pokdarwis diberikan kepada Bapak Putu Suada melalui SK Perbekel No. 25 tahun 2016 dan penugasan ini dipandang era baru mengingat Putu Suada memiliki banyak waktu dan minat besar menggerakkan desa wisata setelah pensiun dari hotel. Penetapan Ketua Pokdarwis selanjutnya disertai dengan pemilihan anggota dari masyarakat dimana setiap banjar/ dusun mengirimkan wakilnya yang memiliki latar belakang pariwisata untuk duduk dalam Pokdarwis sehingga susunan pengurus berjumlah 15 orang perwakilan dari 13 banjar di Desa Munggu dengan pengecualian Banjar Gambang mengirimkan 2 orang wakil karena keanggotaan banjar jauh melampaui banjar lainnya. Dengan anggota Tim Pokdarwis yang berasal dari setiap banjar yang ada di Desa Munggu maka keterwakilan masyarakat sudah direpresentasikan. Tim Pokdarwis mulai bergerak dengan mempelajari tugas pokok Pokdarwis yang didasari Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dalam pengelolaan potensi desa.

1. **Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan**

Dengan berpegang pada tugas pokok Pokdarwis sebagai pengelola desa wisata maka identifikasi potensi desa dilakukan dan berhasil mendata enam potensi utama, yakni (a) budaya *mekotek* sebagai tradisi warisan lintas generasi, (b) pantai berpasir hitam nan eksotik, (c) hamparan persawahan seluas 500 hektar dari luas total wilayah Desa Munggu 800 hektar, (d) ayunan tradisional di Balai Banjar Kerokokan, (e) mata air pancoran Garuda yang dipandang berkhasiat menghilangkan penyakit kulit, serta (f) Sungai Penet yang berpeluang dikembangkan sebagai wisata tirta. Rencana program kerja (proker) untuk pengembangan potensi tersebut disampaikan dihadapan *stake-holders* desa baik Perbekel, PKK, Kelian dinas, Kelian adat, Bendesa adat, Pemangku, Tenaga Kesehatan Puskesmas, nelayan, seniman, pemangku dalam Musyawarah Desa. Sosialisasi dilaksanakan secara bertahap agar efektivitas audiensi maksimal dimana setiap pemuka desa memahami konsep desa wisata dan mendukung rencana pengembangan yang disusun. Rencana yang disiapkan mendapat koreksi dan masukan hingga program kerja yang disusun itu mendapat tanggapan Dinas Pariwisata dengan master plan termasuk pendampingan dan pendanaan. Berbekal respon Disparda selalu fasilitator, Pokdarwis kian bersemangat bekerja menangani desa wisata apalagi akses kantor yang sebelumnya di kantor desa kini diberikan kantor sendiri sebagai ruang kerja yang sebelumnya merupakan ruang belajar SMA Widya Bhuana Munggu.

1. **Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pokdarwis**

Tindakan nyata yang dilakukan Pokdarwis setelah menyusun dan mensosialisasikan program kerja adalah melaksanakan rencana. Potensi yang pertama digarap adalah pantai diperkuat SK Perbekel Munggu Tahun 2016. Karena letaknya bersisian dengan pantai Seseh dan pantai Pererenan maka permakluman dilakukan dengan pemuka desa tetangga. Demikian juga, lahan parkir yang digunakan adalah laba Pura Surungan maka dilakukan kontrak lahan parkir dengan masyarakat penyungsung pura. Hal pertama yang dilakukan pengelola adalah merawat pantai. Artinya, kegiatan dipusatkan di pantai Munggu agar tercipta suasana pantai yang aman dan nyaman bagi setiap pengunjung. Perawatan tersebut meliputi menjaga kebersihan, penataan pedagang, pengadaan toilet, penyediaan atraksi *surfing lesson*, ayunan kayu, spot *selfie* 2 buah, serta fasilitas *information desk* yang dilengkapi thermometer-gun dan *hand sanitizer.* Penataan yang paling ikonik adalah nama pantai di atas batu dengan latar pantai yang indah serta *Black Sand Bar* yang dikelola oleh Munggu Transport.



**Gambar 1** Pantai Munggu

Koleksi peneliti, 2022

Demi menjadikan pantai Munggu sebagai tempat kunjungan yang bersih dan nyaman setiap saat, kebersihan pantai Pantai Munggu sangat diperhatikan. Pembersihan dilaksanakan secara berkala yakni (a) pembersihan *deep cleaning* oleh para pedagang setiap Senin pagi mulai 07.00 WITA dilanjutkan dengan pertemuan dengan pedagang, (b) Edukasi kebersihan pantai oleh *Trash Hero* setiap Minggu sore mulai 16.00 WITA, (c) pembersihan oleh tukang sapu pantai setiap pagi hari kecuali Senin.

Tidak setiap kegiatan mendapat respon positif. Buktinya, meskipun seluruh kegiatan pendapatan dan pengeluaran telah dicatat dan dilaporkan kepada Perbekel, tetapi ada pihak yang melaporkan pungutan parkir sebagai tindak pungli (pungutan liar) dan Ketua Pokdarwis dipanggil Polda Bali untuk dimintai keterangan terkait dugaan pungli. Ternyata, pungutan parkir yang berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2020 tergolong pungli karena melakukan tindak komersil di wilayah desa wisata tanpa kolaborasi dengan lembaga usaha desa, dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Benturan kepentingan juga tampak pada pembatasan kontrak lahan parkir hanya 2 tahun, padahal lahan parkir akan tetap dibutuhkan. Jika saja biaya kontrak kelak dinaikkan, itu masih membuka peluang kerjasama. Keputusan waktu kontrak yang singkat dapat dipandang sebagai pencegahan kemajuan pantai Munggu yang didasari atas kecemburuan sosial. Benturan lain datang dari desa di sebelah timur yang keberatan bila kegiatan pengunjung meluber ke luar batas desa berhubung retribusi parkir hanya diterima di pantai Munggu, sementara desa di sekitarnya hanya mendapatkan sampah dan keramaian. Dengan pendekatan yang ramah, semua riak keberatan itu dapat diatasi meskipun memakan waktu dan kesabaran yang besar.

1. **Kolaborasi dengan BumDes**

Untuk membersihkan nama dari dugaan pungli dan mematuhi Nomenklatur Kementerian Desa maka Desa Munggu segera membentuk BumDes dengan merekrut tiga anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan. Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Badung. Kegiatan pokok BumDes adalah menyediakan segala kebutuhan kantor dan lembaga lainnya baik suplai makanan minuman, ATK dan baju seragam, disamping perdagangan umum. Sebagai bentuk kerjasama pertama Pokdarwis dengan BumDes adalah pemberian hak sebagai penyalur barang dagangan kepada pedagang di pantai oleh BumDes dengan harga dibawah atau sama dengan harga jual di pasar ditambah layanan yang ramah. Kolaborasi dengan BumDes baru dimulai tahun 2021 yakni segera setelah BumDes terbentuk. Kolaborasi lainnya adalah pengadaan alat permainan air berupa pelampung bebek di muara yang dibayar melalui penyusutan. Di era ini pula tim Pokdarwis mulai diberi jasa per bulan namun dipertahankan sebagai modal pembentukan Koperasi Merta Wisata. Artinya, dugaan pungli berhasil digeser dengan kolaborasi yang menguntungkan semua pihak melalui pencatatan yang tertib dan terlaporkan. Wadah koperasi yang dibentuk beranggotakan para pedagang di pantai dalam layanan permodalan atau simpan pinjam.

1. **Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan keuntungan**

Dalam suatu usaha komersil tentu keuntungan menjadi harapan besar. Pengelolaan desa wisata dalam hal ini Pantai Munggu telah menampakkan pendapatan yang lumayan yang berasal dari karcis parkir dan retribusi pedagang. Meskipun pantai kerap digunakan sebagai ajang festival layang-layang namun yang dipungut hanya karcis parkir sedangkan biaya penyewaan tempat tidak dikenakan karena pantai adalah area publik. Dari pendapatan yang diperoleh, Pengelola membagi keuntungan atas 2 bagian setelah dikurangi biaya operasional dan biaya penyusutan. Biaya operasional termasuk gaji untuk pengelola dan gaji dua orang tukang sapu pantai masing-masing Rp1.250.000,- Selanjutnya dibagi dengan komposisi 55 % untuk Pengelola sedangkan 45% untuk BumDes. Menurut wawancara dengan Ketua Pokdarwis desa wisata Munggu, keuntungan dari pengelolaan pantai dan dana lainnya yang terkumpul di BumDes tidak terlalu besar karena kegiatan BumDes belum maksimal. Dana itu selanjutnya dibagi kepada masyarakat sesuai AD/ART. Pembagian keuntungan ditetapkan sebagai berikut. (a) Bagi setiap desa adat di wilayah Desa Munggu mendapatkan masing-masing 5% baik untuk desa adat Munggu, desa adat Pandean dan desa adat Bujangga. (b) Untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar 20%, (c) dana sosial mendapat porsi sebesar 5%. Dana sosial umumnya diserahkan dalam bentuk *punia* (donasi, sumbangan) dalam rangka upacara piodalan di Pura Kahyangan Tiga. Dana sosial juga dapat dialokasikan untuk dana pendidikan yakni subsidi bagi keluarga yang sangat membutuhkan dana pendidikan anak dibuktikan dengan prestasi belajar.

1. **Pemenuhan indikator pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat**

Bila bercermin pada rangkaian aktivitas Pokdarwis dalam mengelola Desa Wisata Munggu sejak pembentukan dimana seluruh anggotanya adalah warga masyarakat setempat yang mengetahui seluk beluk pariwisata. Inisiasi seluruh kegiatan dimulai dari bawah dimana Ketua yang ditunjuk berupaya menggali berbagai informasi terkait pengelolaan desa wisata dari desa-desa wisata yang telah berhasil terlebih dahulu. Referensi dari luar sebagai bahan melihat potensi desa sendiri sehingga dapat bergerak berdasarkan pengalaman orang lain yang disesuaikan dengan kondisi desa sendiri. Pokdarwis berada dibawah Desa Dinas Munggu sebagai lembaga yang legal pemilik wilayah desa. Seluruh kegiatan pengelolaan diabdikan bagi kesejahteraan seluruh anggota masyarakat desa dimana kesempatan kerja dan kesempatan berdagang berniaga diutamakan bagi warga desa Munggu sendiri. Secara umum pedagang lokal menyediakan makanan, seperti tipat sate, tipat cantok, rujak, es campur, es kelapa muda, minuman kaleng, air mineral, *soft drink*, jagung bakar dan makanan ringan lainnya. Jenis panganan yang tidak bisa disediakan oleh warga setempat baru diberikan kepada kaum pendatang seperti penyedia bakso, lumpia, siomay, tahu tek, jasuke, sosis bakar dan makanan lainnya. Secara nyata tampak kesempatan untuk memperoleh perbaikan ekonomi terbagi merata baik bagi warga lokal maupun warga luar desa yang ambil bagian di destinasi wisata pantai Munggu. Pembauran warga ini membuat suasana kondusif sama-sama menjaga area agar kedatangan pengunjung semakin banyak dan memperoleh kenyamanan selama menikmati pantai Munggu. Keakraban antar warga pedagang kian terjalin erat melalui kerja bakti bersih-bersih pantai setiap Minggu. Di sisi lain, keakraban tim Pokdarwis juga baik dan akrab dengan Perbekel sebagai penguasa desa serta dengan lembaga lain diantaranya BumDes, kelian dinas, kelian adat, pemangku, dan pemuka desa lainnya melalui musyawarah desa yang diselenggarakan secara berkala. Pembagian keuntungan telah sampai kepada masyarakat meskipun jumlahnya masih kecil (5%) melalui lembaga yang relevan dalam hal ini, desa adat. Keuntungan juga dibagi sebesar 5% untuk dana sosial yang disumbangkan untuk upacara keagamaan dan atau pendidikan. Jadi, seluruh indikator pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat model Bali telah terimplementasi di desa wisata Munggu.

Pengelolaan demokratis yakni dari, oleh dan untuk masyarakat telah digenapi oleh Pokdarwis Desa Wisata Munggu mulai dari pembentukan Pokdarwis oleh pemerintah desa. Dalam hal ini Desa Munggu melalui perwakilan masyarakat dalam Pokdarwis telah melakukan sosialisasi program kerja kepada *stakeholders*, membuka kesempatan kerja/usaha serta melaporkan penerimaan keuntungan finansial. Di sisi lain, masyarakat dapat memberi masukan atas rencana kerja sepanjang untuk perbaikan yang lebih besar. Jadi, model pengelolaan desa wisata Munggu telah sesuai dengan asas pengelolaan berbasis masyarakat sehingga tidak mengherankan Ketua Pokdarwis Desa Wisata diangkat sebagai Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Badung dan juga sebagai Kepala Bidang Tata Kelola Desa Wisata Bali. Untuk menggenapi era baru maka sejak awal tahun 2022 Pokdarwis telah melibatkan kaum muda khususnya Karang Taruna dalam pengelolaan desa wisata untuk bidang teknologi informasi (IT), pembuatan paket tour, ekonomi kreatif, dan pembuatan video promosi. Promosi di sosial media tetap dilakukan melalui facebook, Instagram dan Tik tok. Untuk memperkenalkan *mekotek* non tradisi telah dirancang dalam bentuk pragmen tari yang telah berlatih keras dan siap pentas. Namun, paparan virus covid 19 yang merajalela sejak tahun 2020 membuat karya seni tersebut tertunda dipentaskan hingga kini. Berdasarkan paparan Bapak Putu Suada, selaku ketua Pokdarwis Desa wisata Munggu, paket *Mekotek* bahkan sudah mendapat HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan hanya boleh ditarikan di wilayah desa Munggu. Dalam rancangan paket wisata itu, pragmen tari *Mekotek* dipentaskan dari perempatan beringin ke selatan selama kurang lebih 30 menit sepanjang < 1 km. Dalam garapan tersebut partisipasi pengunjung domestik maupun mancanegara jika sudah melakukan registrasi diijinkan untuk mengikuti festival. Panitia nantinya menyediakan *kamen* (kain panjang*)*, *udeng* (ikat kepala) dan selendang dan sarana *mekotek* yakni tongkat kayu pulet berhiaskan *tamiang kolem*

1. **SIMPULAN**

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, penulis sangat terbantu dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat desa Munggu secara umum dan untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan secara khusus kepada Kepala Desa Munggu, Bapak Ketut Darta, serta Ketua Pokdarwis Desa Wisata Munggu, Bapak Putu Suada serta seluruh staf Perbekel Desa Munggu yang membuka akses informasi bagi penulis. Tanpa bantuan dan informasi darinya penelitian ini tentu sulit terwujud. Kontribusi beliau sangat besar dalam penggalian informasi mendalam dan akurat. Penulis juga berterima kasih kepada Rektor Universitas Triatma Mulya atas dorongan bagi pelaksanaan penelitian yang diluncurkan LP3M.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih digunakan untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan/ penulisan artikel, baik dalam bentuk support dana, perizinan, konsultan, maupun kontribusi tim yang berperan dalam membantu pengambilan data.

**REFERENSI**

Cooper, Chris, Jhon Flecher, David Gilbert and StephenWainhill. 1993. Tourism Principle and Practice. London: Pitman Publishing.

Darma Putra, N. (Ed). 2015. Pariwisata Berbasis Masyarakat. Denpasar: Program Studi Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana.

 David, Fred R. 2011. Manajemen Strategis. Jakarta: PT Intan Sejati Klaten.

Fandeli, C. 2002. Perencanaan Kepariwisataan Alam. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.

Fannel, D. 1999. Ecotourism: An Introduction. London: Routledge.

Goodwin, H. 1998. Sustainable Tourism and Property Elimination. Paper on workshop on Sustainable Tourism and Property. United Kingdom.

Gunawan, Myra P.1997. Pariwisata Indonesia: Berbagai Aspek dan Gagasan Pembangunan. Bandung: Pusat Penelitian Lembaga Penelitian ITB.

Inskeep. 1995. Tourism Planning an Integrated and Sustainable Development Approach.

Ismaningrum, Tiwik. 2005. Analisis Pariwisata Massa dan Pariwisata Minat Khusus di Kabupaten Buleleng. Tesis Kajian Pariwisata Universitas Udayana.

Kodhyat, H dan Sugiarto, Endar. 1992. Kamus Pariwisata dan Perhotelan. Jakarta: PT. Gramedia Widya Sarana.

Kodhyat, H. 1997. Hakekat dan Perkembangan Wisata Alternatif. Bandung: ITB.

Kusmayadi dan Sugiarto. 2002. Metodelogi Penelitian di Bidang Kepariwisataan. Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama.

Mahagangga, Anom, Suryasih, Suryawan, Mertha. 2015. Kajian Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung. Denpasar: Senastek.

Nasir. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia Jakarta.

Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3.

Pitana, Gde dan Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.

Pitana, Gde 2004. Mispersepsi Pemberdayaan Masyarakat dalam Kepariwisataan Bali. Bali Post, Maret 2004. Hal 7.

Pitana, Gde. 2006. Kepariwisataan Bali dalam Wacana Otonomi Daerah. Jakarta: Puslitbang kepariwisataan.

Priasukmana dan Mulyadin. 2001. Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. Info Sosial Ekonomi Vol 2 No 1.

Putra, 2008. Eksotisme Sebagai Modal Dasar Pengembangan Desa Wisata.

Rangkuti, F. 2004. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tim. Perbup Badung No. 22 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung.

Tim. Perbup Badung No. 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung.

Umar, H. 2003. Strategic Management in Action. Jakarta: T.Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

www.propoortourism.org.uk. Diunduh tanggal 10 Januari 2021

[http://id.wikipedia.org/wiki/Desa\_wisata](http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata%20) diunduh tanggal 10 Januari 2022

<http://tourism.padang.go.id/index.php?tourism=news&id=5>.

**BIODATA PENULIS**

Dr. I Wayan Kartimin, SS, M. Par merupakan dosen bidang ilmu pariwisata Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulya dan mendapatkan gelar Doktor Pariwisata dari Universitas Udayana, 2020. Selepas itu, mulai rajin menulis artikel disamping mengajar. Gemar melakukan pengabdian masyarakat di berbagai desa wisata di Bali.

Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum berstatus sebagai dosen dipekerjakan pada Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulya sejak 2007 yang mendapatkan gelar Doktor Linguistik dari Universitas Udayana, 2014. Gemar berkolaborasi dengan bidang ilmu lain khususnya pariwisata menyesuaikan dengan tempat bertugas sehingga artikel yang ditulis kerap mengusung pariwisata, bahasa dan budaya.